

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penegasan Istilah.....	11

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka.....	19
1. Pengertian Kompetensi Absolut.....	19
2. Dasar Hukum Kompetensi Absolut.....	22
B. Kompetensi (Kewenangan).....	24
C. Jenis-jenis Kewenangan.....	28

D. Fokus Kajian Teori Kewenangan	30
E. Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi <i>Sharia</i>	35
F. Kewenangan Pengadilan Umum	36
G. Kewenangan Relatif PN.....	47
H. Sengketa Kewenangan Mengadili	48
I. Dasar Hukum Pengadilan Dalam Memeriksa	55
J. Penelitian Terdahulu	58
K. Paradigma Penelitian	63

BAB III METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian.....	64
2. Jenis Penelitian	66
3. Kehadiran Peneliti.....	67
4. Lokasi Penelitian.....	68
5. Sumber Data	68
6. Analisis Data.....	74
7. Pengecekan Keabsahan Data	78
8. Tahap-Tahap Penelitian	80

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data	82
1. Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung.....	82
2. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	84

B. Temuan Penelitian	86
1. Dasar yang digunakan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara nomor 36/Pdt.G/PN Tlg.	86
2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah nomor 36/Pdt.G/2015/PN Tlg.	87
3. Akibat hukum putusan sengketa ekonomi syariah nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Tlg.	98
4. Dasar yang digunakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus perkara sengketa ekonomi syariah nomor 1288/Pdt.G/2017/PA.Kab Kdr.	100
5. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus senegketa ekonomi syariah nomor 1288/Pdt.G/2017/PA.Kab Kdr.	101
C. Analisis Data Lintas Kasus	106
a. Implementasi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Tulungagung.....	106
b. Implementasi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	107
c. Kendala dalam Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah.....	108

BAB V PEMBAHASAN

A. Standar Operasional Prosedur Penerimaan Perkara Perdata.	110
1. Standar operasional prosedur penerimaan perkara perdata di pengadilan negeri kabupaten Tulungagung	110
2. Standar operasional prosedur penerimaan perkara perdata di pengadilan negeri kabupaten Kediri.....	111
B. Implementasi Kompetensi Absolut Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dalam mengeluarkan putusan nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Tlg.	111
C. Implementasi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengeluarkan putusan 1288/Pdt.g/2017/PA.Kab.Kdr.	126

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	135
B. Implikasi	138
C. Saran	138

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN